

EKSPRESI PARTAI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yohanes Museng Ola Buluamang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT
Jl. Polisi Militer No. 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85111, Indonesia
No. Telp./Hp: 081236294462/081236697597
E-mail: oyan_waibaloen@yahoo.co.id

Naskah diterima tanggal 20 Februari 2019, direvisi tanggal 1 April 2019, disetujui tanggal 5 Mei 2019

POLITICAL PARTY EXPRESSION OF REGIONAL LEGISLATIVE IN NUSA TENGGARA TIMUR PROVINCE

Abstract. *In realizing the role of political parties, legislative members had been faced with a battle of political discourse in the courtroom. The purpose of this study is to explore the political communication performance of legislators in the NTT provincial legislature in expressing party ideology. The research method that used is qualitative approach. The results shows that the expression of political party ideology verbally and nonverbally was carried out in accordance with the context and function of political communication politics, leading to the management of audience impressions that display positive emotions, politeness, and impression management and facework strategies. Besides that, the expression of the ideology of political parties by DPRD members is carried out in the form of political lobbying, political negotiations and political rhetoric which presents three political stages as a space for communication. The three forms of political communication have different political agendas communicated among DPRD members, between DPRD members and the government so that the context of political communication often experience message distortions and message inconsistencies which have implications for the quality of communication performance of DPRD members.*

Keywords: *expression, ideology of political parties, political communication.*

Abstrak. Dalam mewujudkan peran partai politik, anggota legislatif dihadapkan pada pertarungan wacana politik di ruang sidang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kinerja komunikasi politik para anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengekspresikan ideologi partai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal dilakukan sesuai dengan konteks dan fungsi politik komunikasi politik, mengarah pada pengelolaan kesan audiens yang menampilkan emosi positif, kesantunan, manajemen kesan dan strategi *facework*. Selain itu, pengekspresian ideologi partai politik oleh anggota DPRD dilakukan dalam bentuk lobi politik, negosiasi politik dan retorika politik yang menghadirkan tiga panggung politik sebagai ruang berkomunikasi. Ketiga bentuk komunikasi politik tersebut memiliki perbedaan agenda politik yang dikomunikasikan sesama anggota DPRD, antara anggota DPRD dengan pemerintah sehingga konteks komunikasi politik seringkali mengalami distorsi pesan dan inkonsistensi pesan yang berimplikasi terhadap kualitas kinerja komunikasi anggota DPRD.

Kata kunci: ekspresi, ideologi partai politik, komunikasi politik.

PENDAHULUAN

Pesan politik atau aspirasi politik masyarakat dalam sistem politik demokratis berupa tuntutan (*demanding*) dan dukungan (*supporting*) yang selalu diarahkan kepada pemerintah (Maarotong, 2014). Penyalurannya dilakukan oleh partai politik bersama kelompok kepentingan, media massa dan aktor-aktor lainnya melalui fungsi komunikasi politik, artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan (Abdullah, 2009). Terwujudnya peran partai politik ditentukan oleh bagaimana anggota partai politik menunjukkan perilaku politik pada saat melaksanakan komunikasi politik (Monroe, 2012). Prinsipnya, apa saja pesan yang disampaikan, komunikasi politik yang dilaksanakan seyogyanya mengomunikasikan visi dan misi partai, ideologi partai dan bermuara pada perjuangan kepentingan masyarakat pada umumnya (Arifin, 2011).

Penerapan komunikasi politik mempertimbangkan pula strategi komunikasi yang digunakan untuk mencapai kompromi atau kesepakatan (Arifin, 2011). Strategi komunikasi politik yang ditunjukkan oleh politisi pada saat persidangan yaitu pemahaman terhadap khalayak, mempertimbangkan pengaturan lingkungan tertentu, menyusun pesan-pesan politik yang persuasif dan penetapan metode, serta memerhatikan kerangka acuan tertentu dan bidang pengalamannya. Sebagai komunikator, anggota partai politik selektif menransmisikan atau menolak sebuah pesan, mengulang-ulang atau meringkas pesan dalam rangka mengambil keputusan yang tepat bagi lawan bicaranya (McNair, 2003).

Problem teoretik terkait ekspresi ideologi partai politik tampak dalam beberapa kajian tentang ideologi partai politik di Indonesia yang banyak bermunculan akhir-akhir ini (Firmanzah, 2011). Misalnya, riset mengenai bagaimana pemahaman Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencari garis ideologinya sebagai partai yang bernuansa Islam di tengah semakin banyaknya partai bernuansa Islam lainnya (Aziz dalam Firmanzah, 2011).

Kajian ini menunjukkan letak problem teoretiknya pada pengekspresian ideologi

partai politik oleh politisi kurang sejalan dengan ideologi yang dianut politisi oleh karena sikap pragmatis, sehingga partai politik mengalami kesulitan dalam internalisasi ideologi partai politik. Firmanzah (2011) menegaskan bahwa ideologi partai politik adalah dimensi yang kompleks. Untuk menganalisis ideologi partai politik, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, seperti figur yang ditonjolkan, visi dan misipartai, struktur partai, strategi partai, media komunikasi dan isu-isu politik.

Bahwasanya politik sebagai pembicaraan mensyaratkan penggunaan bahasa politik (Nimmo, 2004). Keahlian komunikasi terwujud dalam penggunaan bahasa, simbol-simbol politik dalam proses pertukaran pesan-pesan politik. Bahasa verbal dan nonverbal menjadi media para anggota DPRD berekspresi dalam menjalankan fungsi komunikasi politik di parlemen (Dutu, 2011). Kemampuan mengekspresikan ideologi partai pada saat komunikasi politik ditunjukkan secara maksimal dengan tujuan memengaruhi audiens dan mengubah pandangan dan sikap (Gurāu & Ayadi, 2011).

Akan tetapi, yang menjadi problem normatifnya adalah dalam mewujudkan peran partai politik, anggota legislatif dihadapkan pada pertarungan wacana politik di ruang sidang dengan anggota legislatif dari partai politik lainnya dan pemerintah (Husain, 2011; Pulungan, 2000). Alasannya, karena masing-masing anggota legislatif berupaya mempertahankan agenda partai dan ideologi partai. Berbagai polemik terkait kebijakan eksekutif sering berujung pada perang opini dengan legislatif yang berujung konflik. Misalnya, Syahrini, *et.al.*, (2012) menjelaskan bahwa bentuk konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan daerah Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) Kabupaten Bulukumba adalah konflik antarorganisasi, yakni antara lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Bulukumba. Untuk menghindari terjadinya konflik, etika komunikasi diperhatikan dalam penyampaian pesan-pesan politik yang meliputi kritis, rasional dan teleologis (Winda, 2016).

Salah satu fenomena komunikasi politik yang menarik untuk dikaji adalah komunikasi

politik para elite politik dalam sistem politik. Pihak elite yang berada di ranah suprastruktur politik yaitu eksekutif dan legislatif memiliki fungsi untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi dan kepentingan, yang nantinya dinegosiasikan atau diperjuangkan menjadi produk kebijakan publik (Sulaiman, 2013).

Praktik kehidupan politik di gedung DPRD Provinsi NTT memunculkan pula berbagai problem dan fenomena komunikasi politik menarik yang dapat dicermati dari perspektif keilmuan. Pada penelitian ini fenomena komunikasi politik yang dikaji lebih jauh adalah tampilan atau *performance* perilaku komunikasi politik para anggota legislatif atau DPRD Provinsi NTT dalam mengomunikasikan segala pesan politik selama pelaksanaan sidang atau rapat di gedung DPRD Provinsi NTT. Problem empirisnya adalah pengekspresian ideologi partai politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT seringkali kurang sejalan dengan ideologi yang dianut partai politiknya. Dengan demikian, konsentrasi komunikasi politik yang dikaji adalah perilaku verbal, nonverbal dan penerapan bentuk-bentuk komunikasi politik yang mengekspresikan ideologi partai politik anggota DPRD Provinsi NTT dalam menyampaikan pesan politik.

LANDASAN KONSEP

Komunikasi Politik dan Ideologi Partai Politik

Pada intinya, komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan politik dalam bentuk verbal dan nonverbal dari seseorang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain dalam konteks politik untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi politik memiliki lima fungsi dasar, yakni; memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada, menyediakan diri sebagai *platform* untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat, membuat

publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik (Cangara, 2010).

Rachmiate, *et.,al.*, (2013), menggambarkan unsur-unsur strategi komunikasi sebagai berikut: merumuskan visi organisasi, menetapkan serangkaian rencana yang tepat menurut data dan informasi yang ditemukan di lapangan (*fact finding*), menetapkan taktik, meletakkan posisi organisasi, program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, dan menempatkan berbagai komponen komunikasi, dan menyusun pola aktivitas komunikasi. Arifin (2011), mengklasifikasi beberapa bentuk komunikasi politik yang seringkali dipraktikkan oleh para politisi, di antaranya, retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, lobi politik, dan negosiasi politik.

Teori Negosiasi dan Presentasi Diri

Pendekatan komunikatif dalam teori negosiasi difokuskan pada interaktif elemen-elemen dalam proses negosiasi dengan menggunakan cara simbol, pesan, dan bahasa untuk membujuk orang lain dalam proses mencapai kesepakatan. Pendekatan ini memiliki tiga teori penting, yakni; *framing*, menyusun strategi, dan mengelola hubungan. Sedangkan, teori presentasi diri didasarkan pada asumsi bahwa seseorang menghadirkan seperangkat perilaku selama interaksi yang akan menuntun orang lain untuk memastikan jenis atribusi tentang seseorang. Perilaku dan atribusi terkait diringkas menjadi lima tipologi jenis atribusi, strategi karakteristik yang memperoleh masing-masing atribusi, dan berbagai taktik untuk melaksanakan strategi tersebut. Pada setiap tingkat, upaya sadar diarahkan untuk menafsirkan situasi dan memberlakukan perilaku yang sesuai. Tujuan pertama hanya menunjukkan kompetensi sosial. Ketika tujuan ini tercapai, interaksi berlangsung lancar dan menegaskan bahwa identitas sosial terbentuk dan dipertahankan tanpa banyak usaha yang sadar (Littlejohn & Foss, 2009).

Telaah Riset-Riset Terdahulu

Irwan Pane (2011) meneliti tingkat pengetahuan kemampuan berbicara di depan umum (*public speaking*) para anggota DPRD

Kota Makassar, kemampuan dan keterampilan *public speaking*, serta kepribadian dalam berpidato masing-masing anggota dalam memerankan dirinya sebagai komunikator politik yang profesional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan *public speaking* DPRD Kota Makassar memiliki proporsi terbalik, tingkat keterampilannya dalam berkomunikasi (*public speaking*) dalam rapat-rapat cenderung emosional dan sering kali dengan suara yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh karakter dan temperamen individu yang didasari atas kepentingan politik sebagian besar anggota dewan.

Penelitian lain tentang bagaimana penampilan anggota DPRD dalam pelaksanaan rapat dan sidang DPRD. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terlihat hampir semua politisi tampil memikat di panggung depan juga belakang. Gaya berbusana menjadi simbol *front stage* yang jauh lebih dominan dilihat dari simbol lainnya. Gaya bicara yang dikemas di panggung depan pada rapat fraksi, komisi dan paripurna terutama memperlihatkan proses pencitraan yang sengaja diidealisasi dan dikemas dalam suasana yang sangat formal (Kumaini & Anwar, 2012).

Dalam penelitian yang berjudul Ideologi dalam Konteks Komunikasi Politik: Kajian Semiotik terhadap Iklan Nasional Demokrat versi “HIMNE”, didiskusikan iklan Nasdem versi “Hymn” yang diluncurkan oleh organisasi kemasyarakatan dengan

menggunakan model semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian mengungkapkan makna dari iklan politik adalah tujuan politik yang disampaikan oleh partai Nasional Demokrat (Nasdem) kepada semua masyarakat Indonesia melalui iklan tersebut (Hasang, *et.,al*, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, analisis studi kasus dilakukan terhadap bentuk-bentuk pengekspresian pesan politik saat proses komunikasi politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019 pada saat keberlangsungan sidang di gedung DPRD Provinsi NTT (Littlejohn & Foss, 2009). Oleh karena itu, studi ini melalui beberapa mekanisme kerja di antaranya; kategorisasi pelaksanaan sidang DPRD Provinsi NTT berdasarkan agenda rapat, pemisahan bentuk-bentuk komunikasi politik dan beberapa anggota DPRD berdasarkan partai politik, sehingga data yang diperoleh terfokus pada pendekatan studi kasus yang digunakan. Unit kajian penelitian ini adalah semua anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019. Hasil penarikan sampel yang menggunakan *purposive sampling* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Kedudukan
1	Alexander T. Ofong, S. Fil	Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi NTT
2	G. Gusti Beribe, S. Pd	Fraksi PDIP DPRD Provinsi NTT
3	Kasintus P. Ebu Tho	Fraksi Partai Gerinda DPRD Provinsi NTT
4	Leonardus Lelo, S. Ip, M.Si	Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT
5	Jimmy Sianto, SE, MM	Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi NTT
6	Thomas Tiba, S.Ag	Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT
7	Anwar Hajral	Fraksi PKS DPRD Provinsi NTT
8	Agustinus Lobo	Fraksi PAN DPRD Provinsi NTT
9	Yucun Lepa	Fraksi PKB DPRD Provinsi NTT

Sumber: Data diolah (2018)

Dari sembilan informan tersebut, hanya dua informan yang diwawancarai, sedangkan sisanya tidak bersedia diwawancarai, dan hanya menyerahkan dokumen yang diminta.

Teknik pengumpulan data meliputi *depth interview*, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis taksonomik. Teknik analisis

ini terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilah domain tersebut menjadi subdomain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan (Littlejohn & Foss, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ekspresi Verbal dan NonVerbal Ideologi Politik dalam Komunikasi Politik

Praktik komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT dalam mengekspresikan ideologi partai politik dilakukan secara verbal dan nonverbal di pelbagai pelaksanaan sidang. Eksplorasi ekspresi verbal dan nonverbal anggota partai politik dalam proses komunikasi politik mengungkapkan konsistensi anggota DPRD Provinsi NTT dengan ideologi partai politik yang dianut.

Ekspresi verbal dan nonverbal memiliki karakter yang berbeda-beda antara para anggota DPRD Provinsi NTT dalam penggunaan bahasa politik. Hasil observasi menunjukkan bahwa anggota DPRD dari fraksi partai NasDem selalu menyebut kata *restorasi* setiap kali diberi kesempatan berbicara pada saat pelaksanaan sidang. *Tagline* restorasi mencerminkan ideologi partai NasDem yang memotivasi para anggota partai NasDem untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini ditegaskan lagi dalam petikan hasil wawancara.

“Karena itu kita selalu mendorong setiap kader kita bahwa nilai-nilai itu harus sudah terinternalisasi menjadi nilai diri sendiri sehingga tidak perlu lagi bertanya ke partai kecuali keputusan-keputusan prinsip yang memang sudah diagendakan menjadi bagian dari keputusan fraksi. Itu kan harus dibicarakan bersama, tapi kalau itu keputusan sendiri yaah menjadi bagian dari keputusan sendiri. Kita di sana kan terbagi ke dalam komisi-komisi, dan alat kelengkapan-kelengkapan yang lain. Saya juga menjadi salah satu pimpinan DPRD mendapat kepercayaan dari partai NasDem mengambil keputusan-keputusan dalam kapasitas sebagai pimpinan itu juga tetap dibingkai oleh

semangat restorasi” (Wawancara dengan Alex Ofong, dari Partai NasDem, Wakil DPRD Provinsi NTT, 29 Juli 2018).

Dalam studi dokumen ditemukan pula *tagline* yang disampaikan oleh anggota DPRD dari partai Hanura, seperti; *Bangkit..Jaya..Menang..*”Saatnya Hati Nurani Berbicara” (Sumber: Dokumen Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2018) dan Empat Ranperda Provinsi NTT). Hasil observasi mengungkapkan pula bagaimana anggota DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seringkali menggunakan *tagline marhaen* atau salam perjuangan dalam pelaksanaan sidang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setiap proses komunikasi politik yang dijalankan oleh anggota DPRD Provinsi NTT pada berbagai persidangan terlebih dahulu melalui tahapan di internal partai yang memperhatikan visi dan misi partai politik.

Ekspresi ideologi partai politik secara nonverbal dalam komunikasi politik ditunjukkan dengan beberapa ciri. Pertama, penampilan yang politis. Ekspresi ideologi partai politik diwujudkan dalam pilihan busana yang digunakan oleh anggota, seperti warna busana partai politik, seperti; partai Golkar berwarna kuning, partai NasDem berwarna biru, PDIP berwarna merah. Hasil observasi mengungkapkan bahwa anggota DPRD yang paling konsisten dengan penampilan yang politis berasal dari PDIP, Golkar, Demokrat, NasDem, dan Gerindra. Kedua, *gesture* atau bahasa tubuh. Hasil pengamatan mengungkapkan bahwa dalam rapat-rapat DPRD anggota DPRD Provinsi NTT lebih sering memunculkan bahasa tubuh atau *gesture* yang universal dari pada yang khas. Hasil observasi mengungkapkan bahwa intensitas pengeskpresian nonverbal ideologi politik anggota DPRD terlihat pada saat menyampaikan pandangan politik tentang suatu agenda politik.

Ekspresi Ideologi Partai Politik dalam Proses Lobi Politik

Lobi politik dilakukan antara partai politik dalam berbagai konteks komunikasi politik yang dicirikan dengan perbedaan agenda politik. Dalam lobi politik, ada sikap

selektif yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Provinsi NTT terhadap berbagai agenda politik yang dinilai strategis, sesuai dengan *platform* partai politik masing-masing. Hasil penelitian mengungkapkan kepentingan agenda politik mendorong anggota partai politik memerlukan spirit dan kerja keras dalam memperjuangkannya.

“Ya kalau selama ini yang saya lihat sih walaupun belum sampai seratus persen tapi misalkan masalah pada pertanian perkebunan dan nelayan nah itu setidaknya sudah tersentuh walaupun nggak bisa kita harus mengatakan bahwa semua berjalan normal nggak itu pertama itu visi misi di partai itu juga kan ada juga nah terkait dengan kebijakan-kebijakan lain misalkan persoalan pendidikan dan kesehatan nah ee kita berupaya untuk melakukan penekanan pada pemerintah agar ini sesuai dengan *platform* partai.” (Wawancara dengan Anwar Hajral, Anggota DPRD dari PKS, 19 Maret 2018).

Proses lobi politik yang berlangsung mengedepankan visi dan misi masing-masing partai politik.

“Ya apa namanya ketika melakukan pendekatan awal pada setiap parpol yang memiliki kursi biasa janji muluk begitu kan akan memperjuangkan visi misi partai akan memperhatikan partai dan lain-lainnya” (Wawancara dengan Anwar Hajral, Anggota DPRD dari PKS, 19 Maret 2018).

Pengekspresian secara verbal dilakukan dalam setiap lobi politik terkait kebijakan-kebijakan yang kadangkala menimbulkan pro kontra di antara sesama anggota DPRD Provinsi NTT.

“Ada jadi misalkan berbicara dari apa namanya ya misalkan visi misi partai A dengan partai B biasanya memang nggak ketemu akhirnya dua-duanya ini mencari lawan sendiri kawan sendiri-sendiriapalagi mempedulikan partai A yang berbeda visi misi ini nah itu sering terjadi” (Wawancara dengan Anwar Hajral, Anggota DPRD dari PKS, 19 Maret 2018).

Untuk menciptakan situasi komunikasi politik yang kondusif, pilihan persuasi terhadap partai politik yang berbeda menjadi pendekatan di antara pimpinan DPRD Provinsi NTT. Proses ini seringkali diawali dengan pembicaraan di tingkat partai politik

atau masing-masing fraksi untuk menyamakan persepsi atau pemahaman sehingga mampu meminimalisir perbedaan yang muncul dalam persidangan.

“Kita selalu meminta skor sidang untuk dibicarakan terbatas dgn fraksi-fraksi atau lintas fraksi. Jadi, kita undang-undang ketua atau pimpinan fraksi di luar mekanisme formal, supaya terasa lebih cair. Yang kedua, kita secara formal setiap bulan mengagendakan rapat konsultasi antara pimpinan komisi, pimpinan fraksi dengan pimpinan dewan, sehingga agenda kita satu bulan sudah kita bicarakan memang. Jadi, hal-hal krusial apa saja sudah kita bicarakan di dalam agenda konsultasi lintas pimpinan baik fraksi, komisi, maupun kita pimpinan, dalam alat kelengkapan dewan.” (Wawancara dengan Alex Ofong, dari Partai NasDem, Wakil DPRD Provinsi NTT, 29 Juli 2018).

Kondisi ini disebabkan oleh adanya ikhtiar dari anggota DPRD Provinsi NTT untuk memperjuangkan kepentingan rakyat pada umumnya yang diselaraskan dengan *platform* partai. Dalam proses komunikasi politik tersebut, pengekspresian ideologi politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT mempertimbangkan juga dengan peluang-peluang yang akan terjadi, sehingga pilihan bentuk lobi politik sebagai alternatif komunikasi politik dapat menyelaraskan gagasan yang dikomunikasikan dengan anggota DPRD Provinsi NTT dari fraksi partai politik lainnya.

“Walaupun ada perbedaan antara fraksi, pasti akan ada menuju pada solusinya, supaya ada kesepahaman, ini untuk masyarakat NTT. Pernah juga ada fraksi yang tetap berbeda, tapi secara demokratis itu kan diambil suara terbanyak dari fraksi” (Wawancara dengan Alex Ofong, dari Partai NasDem, Wakil DPRD Provinsi NTT, 29 Juli 2018).

Kasus tersebut di atas disebabkan karena masing-masing fraksi mempertahankan keputusan partai politik atau fraksi yang merepresentasikan masing-masing ideologi partai politik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kadangkala ideologi politik diterjemahkan secara harafiah oleh anggota DPRD apabila agenda pembangunan yang dibicarakan memiliki

perbedaan yang signifikan dengan ideologi partai politik. Dengan alasan ideologi partai politik, pengambilan keputusan dalam membahas kebijakan tertentu tidak bisa ditolerir. Hal ini dialami oleh beberapa fraksi (Gerindra, PAN dan Demokrat) ketika membicarakan agenda pembangunan Kantor Gubernur Provinsi NTT dan Monumen Pancasila Provinsi NTT.

Lobi politik membicarakan juga kebijakan-kebijakan fiskal yang rentan dengan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan lobi politik dengan agenda fiskal seringkali terjadi di *back stage* ketimbang *middle stage* dan *front stage*. Pada tempat ini, ideologi politik seringkali dipertaruhkan dalam menghasilkan kesepakatan yang *win-win solution*. Lobi politik di *back stage* dijadikan sebagai ruang kompromi untuk membicarakan kepentingan tertentu. Ini menunjukkan bahwa ekspresi ideologi politik kurang begitu tampak dalam *content* pembicaraan politik tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi pembicaraan antara ketiga panggung tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lobi politik menggunakan bahasa politik tersendiri yang sebatas dimengerti oleh para anggota DPRD Provinsi NTT. Penggunaan bahasa politik yang khas di antara anggota DPRD Provinsi NTT dalam lobi politik menjadi bagian dari taktik berkomunikasi politik.

Ekspresi Ideologi Politik dalam Proses Negosiasi Politik

Negosiasi politik yang terjadi dalam komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT mencapai kesepakatan untuk memberi *pressure* kepada pemerintah apabila menyalahi beberapa agenda pembangunan yang sudah digariskan dalam RPJMD Provinsi NTT.

“Yang terjadi adalah komunikasi kerjasama antara partai dengan partai atau fraksi dengan fraksi untuk menekan pemerintah. Nah pemerintah sendiri pun dalam hal ini kepada partai-partai pendukung *nggak* pernah melakukan komunikasi setelah pemenangan dan ini kan hampir terjadi pada semua level” (Wawancara

dengan Anwar Hajral, Anggota DPRD dari PKS, 19 Maret 2018).

Negosiasi politik yang seringkali terjadi dilatarbelakangi pula oleh kurangnya komunikasi antara sesama partai politik koalisi yang turut memengaruhi dinamika politik. Dalam situasi seperti ini diperlukan strategi pendekatan yang intens di tingkat pimpinan dewan dan partai politik.

Hasil pengamatan mengungkapkan bahwa pelaksanaan negosiasi politik dalam komunikasi politik antara anggota DPRD Provinsi NTT berlangsung dalam frekuensi yang normal. Hal ini disebabkan karena tidak ada persoalan besar, krusial, dan kebijakan fenomenal yang memunculkan perbedaan dan pertentangan yang tajam. Selain itu, situasi politik di internal DPRD Provinsi NTT kurang memunculkan dinamika politik yang dinamis dan ketegangan-ketegangan politik yang tinggi dimana mengarah pada perlu dilakukannya negosiasi politik.

“Di sini tidak terlalu terasa, karena semua berjalan semacam rutin, tidak ada kasus yang terlalu mencuat karena prosedur pembahasan anggaran, misalnya itupun berproses dari awal dan dia tidak diinterupsi dalam perjalanan, sehingga ketegangan-ketegangan politik tidak begitu tajam seperti yang kita liat kasus di pusat itu kan banyak isu yang digodok sana-sini, itu kan mereka punya kewenangan untuk mengambil itu”(Wawancara dengan Anwar Hajral, Anggota DPRD dari PKS, 19 Maret 2019).

Intensitas negosiasi politik disebabkan juga oleh perubahan relasi kerja antara pihak eksekutif dengan legislatif sebagaimana diatur dalam Permendagri No 80 Tahun 2015. Hal ini kurang memberikan ruang terjadinya perdebatan-perdebatan substansial antara sesama anggota legislatif dan antara DPRD Provinsi NTT dengan Pemerintah Provinsi NTT. Kurangnya perdebatan-perdebatan substansial menyebabkan intensitas negosiasi politik antara sesama anggota DPRD Provinsi NTT kurang berlangsung dalam komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT.

Akan tetapi, dalam studi dokumen dikemukakan bahwa terjadinya perdebatan dan negosiasi politik yang tinggi dalam proses komunikasi politik. Hal ini

diungkapkan dalam dokumen Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Tahun 2018. Berikut penggalan dokumennya.

“Dinamika pembahasan berjalan dalam tempo yang tinggi yang ditandai oleh hangatnya diskusi-diskusi dan perdebatan yang terjadi di komisi-komisi dan di dalam Badan Anggaran. Diskusi dan perdebatan yang hangat terjadi, karena di satu pihak kita memiliki sumber dan dana terbatas, sementara di pihak lain kita memiliki begitu banyak kegiatan sebagai kristalisasi aspirasi masyarakat yang harus dibiayai”(Wawancara dengan Anwar Hajral, Anggota DPRD dari PKS, 19 Maret 2018).

Oleh karena itu, komunikasi politik yang dijalin antara pemerintah dengan DPRD berlangsung harmonis dan kondusif selama ini. Setiap agenda politik yang dibicarakan dan memunculkan perdebatan-perdebatan di antara anggota DPRD dengan pemerintah dapat diselesaikan secara baik.

“Jadi seperti kasus yang di Senayan, saya tidak terlalu merasakan ketegangan seperti itu antara *back stage*, *middle stage* dan *front stage*, sejauh ini, pengalaman saya selama menjadi anggota DPRD, bicara jujur. Bahwa sejauh ini ketegangan antara ketiga panggung ini tidak terlalu tampak. Mungkin juga karena komunikasi politik yang dibangun antara pemerintah dengan DPRD baik di tingkat komisi maupun di fraksi selalu berjalan baik, sehingga segala sesuatu bisa diselesaikan dengan harmonis walaupun ada perdebatan-perdebatan di dalam persidangan tetapi tidak sampai mencuat pada friksi-friksi yang tajam sekali, itu tidak pernah”(Wawancara dengan Alex Ofong, dari Partai NasDem, Wakil DPRD Provinsi NTT, 29 Juli 2018).

Dalam negosiasi politik, setiap agenda politik yang dikomunikasikan antara sesama anggota DPRD dan antara anggota DPRD Provinsi NTT dengan pemerintah Provinsi NTT tetap menjunjung tinggi ideologi masing-masing partai politik. Pada prinsipnya, berbagai persoalan yang dibicarakan dengan pendekatan negosiasi politik tetap bermuara pada masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pemerintah. Dinamika politik yang fleksibel

sekedar memantik respon anggota DPRD Provinsi untuk mengkritik dan memberikan saran tanpa menafikan ideologi partai politik yang dianut. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik, tetapi pada titik tertentu negosiasi politik yang *fair* menghasilkan suatu kesepakatan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi politik terjadi di *middle stage* dan *back stage*. Negosiasi politik yang terjadi kedua panggung politik tersebut membicarakan strategi-staregi politik dalam menghadapi pemerintah yang dianggap kurang kooperatif dan mengabaikan kritik atau masukan dari DPRD terkait program yang direncanakan dan dilaksanakan. Negosiasi politik dilakukan juga antara sesama partai koalisi atau oposisi ketika saling berbeda pandangan atau sikap politik. Sedangkan, negosiasi politik antara DPRD dengan pemerintah membicarakan program dan kegiatan pemerintah yang dinilai kurang proporsional, kurang menjawab persoalan di tengah masyarakat dan tidak berpihak pada masyarakat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pembicaraan di *front stage* yang tidak mencapai kesepakatan dilanjutkan dengan pembicaraan informal di *back stage*. Pembicaraan-pembicaraan tersebut seringkali berlanjut di luar ruangan rapat dan terjadi lagi pertemuan-pertemuan khusus antara pimpinan fraksi, pimpinan DPRD dengan pihak pemerintah.

“Ada hal-hal krusial yang kita bicarakan memang di *level* pimpinan, di *level* pimpinan kita *clear* dulu, lalu kita bicarakan dengan anggota dewan”(Wawancara dengan Alex Ofong, dari Partai NasDem, Wakil DPRD Provinsi NTT). Akan tetapi, realitas lainnya menunjukkan bahwa ada anggota partai politik yang mengabaikan *platform* partai dalam komunikasi politik dengan pendekatan negosiasi politik. “Jadi hampir terjadi di semua partai bahwa namanya *platform* partai atau visi misi untuk didiskusikan dengan pemerintah itu hampir-hampir tidak ada, untuk apa namanya memperjuangkan visi dan misi itu memang selama ini seperti itu”(Wawancara dengan Anwar Hajral, Anggota DPRD dari PKS).

Realitas ini menunjukkan rendahnya komitmen anggota DPRD Provinsi NTT

dalam mewujudkan ideologi partai politik dalam setiap proses komunikasi politik. Negosiasi politik yang berlangsung lebih berorientasi pada kepentingan politik yang didapat dari agenda politik yang dikomunikasikan. Pada kasus seperti ini, seringkali disebabkan karena motivasi politik yang dimiliki atau rendahnya program partai dalam menginternalisasikan nilai-nilai atau ideologi partai politik kepada kader-kader partainya.

“Memang tidak sempurna, karena pertama partai baru, keterjepitan waktu kita kejar mengejar *deadline* politik praktis, untuk mendesain sebuah kaderisasi yang berjenjang, untuk menginternalisasi nilai-nilai berjalan, saya akui tidak sempurna atau maksimal. Tapi, kita selalu coba meminta kader-kader kita membaca, kita ada siap buku putih. Buku ADRT dan *link-link* yang terkait itu, kasih ke kader untuk mempelajari itu, tapi, dalam setiap pertemuan konsolidasi baik di tingkat DPD&DPW maupun di pusat, kita dengan kader-kader partai, kita selalu berikan materi-materi untuk pengkaderan untuk internalisasi. Kita selalu sampaikan bahwa soal kaderisasi itu proses berjenjang bukan bahwa penyampaian materi menjadi bagian dari itu, tapi pentingnya bahwa kehidupan kita dalam politik praktis di NasDem setiap hari adalah bagian dari internalisasi sebagai pengurus di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi bahkan pengurus di DPC dan ranting-ranting kita. Juga kita sampaikan ke kawan-kawan fraksi kita yg sudah terpilih menjadi anggota DPRD itu juga bagian dari proses kaderisasi kita.” (Wawancara dengan Anwar Hajral, Anggota DPRD dari PKS, 19 Maret 2018).

Ekspresi Ideologi Politik dalam Proses Retorika Politik

Ekspresi verbal dalam retorika politik ditunjukkan dalam berbagai konteks komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ekspresi verbal dan nonverbal dalam retorika politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT dilaksanakan pada pelaksanaan berbagai sidang di DPRD Provinsi NTT. Retorika politik berperan penting dalam mempersuasi sesama anggota DPRD Provinsi NTT untuk menerima argumentasi yang disampaikan.

Retorika politik juga ditunjukkan pada saat mengcounter argumentasi yang dikemukakan oleh anggota DPRD lainnya.

Retorika politik yang ditunjukkan dalam komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT ditampilkan dalam rapat-rapat DPRD, seperti pandangan umum fraksi dan sebagainya. Hasil observasi mengungkapkan bahwa retorika politik yang ditunjukkan mengarah pada penggunaan bahasa-bahasa politik, cara penyampaian dan mempertahankan sikap atau pandangan politik terhadap sesama DPRD (pimpinan atau anggota DPRD) dan pemerintah. Penggunaan bahasa-bahasa politik menunjukkan perbedaan di antara para fraksi atau partai politik di dalam lembaga DPRD Provinsi NTT. Hasil studi dokumen menunjukkan bahwa pilihan bahasa politik yang digunakan beberapa partai politik atau fraksi di DPRD Provinsi NTT menunjukkan penggunaan retorika politik *deliberative*. Misalnya, dalam pandangan fraksi terkait RAPBD Provinsi NTT Tahun 2018 yang menyoroti kepentingan rakyat dalam prioritas pembangunan. Argumen politik ini yang mengekspresikan ideologi partai politik, misalnya Partai Keadilan Sejahtera yang menekankan keadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan Provinsi NTT (Sumber: Dokumen Pendapat Akhir Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT 2018).

Cara penyampaian pandangan atau sikap politik terhadap suatu kebijakan juga memperlihatkan perbedaan antara fraksi atau partai politik yang satu dengan fraksi atau partai politik yang lainnya. Ada anggota DPRD yang lugas dalam penyampaian pandangan, sedangkan ada anggota DPRD yang bertele-tele dalam penyampaiannya. Pada situasi seperti ini, ekspresi ideologi partai politik yang terungkap secara verbal seringkali mendapat penekanan dalam setiap penyampaian gagasan oleh anggota DPRD. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam penyampaian pandangan atau pesan politik kepada audiens, digunakan gaya repetisi dalam penyampaian gagasan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perbedaan cara penyampaian dicirikan dengan poin-poin penegasan yang digariskan

dalam pandangan fraksi atau partai politik. Misalnya, pendapat akhir fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD tahun 2018. Dalam dokumen. Berikut ini hasil studi dokumennya.

“Fraksi Partai Demokrat sangat konsisten untuk terus-menerus berupaya mewujudkan politik anggaran NTT yang berwajah manusiawi. Politik anggaran APBD kita masih fokus urus bangun jalan dan jembatan, gedung-gedung megah dan mewah. Belum sungguh-sungguh-sungguh terpenggil untuk urus manusia NTT seutuhnya.” (Sumber: Dokumen Pendapat Akhir Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT 2018).

Ekspresi ideologi partai politik dalam retorika politik dinyatakan juga dalam pilihan frase atau kata-kata dalam narasi pandangan fraksi yang menekankan *tagline* partai dan nama dari partai politik. Misalnya, pendapat akhir fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Tahun 2018 Provinsi NTT.

“Fraksi PKB berpendapat bahwa pembangunan monumen Flobamora Rumah Pancasila akan dapat menjadi spirit dalam peningkatan semangat kebangsaan dalam masyarakat yang plural sekaligus menangkali isu-isu radikalisme di tanah air”. (Sumber: Dokumen Pendapat Akhir Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT 2018).

Pengekspresian ideologi partai politik dalam retorika politik dinyatakan juga dalam pilihan frase atau kata-kata yang merepresentasikan ideologi partai politik. Misalnya, pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT tahun 2018. Berikut hasil studi dokumennya.

“Fraksi mengapresiasi atas gagasan pemerintah untuk membangun monumen Flobamora Rumah Pancasila yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mempertebal rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat NTT sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.” (Sumber: Dokumen Pendapat Akhir Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT 2018).

Selain itu, pengekspresian ideologi partai politik dalam retorika politik mencerminkan juga ideologi partai politik dalam sikap politik. Misalnya, pendapat akhir fraksi PDIP Perjuangan DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2018. Berikut petikan hasil studi dokumennya.

“Monumen Flobamora Rumah Pancasila, bagi Fraksi PDIP Perjuangan tidak hanya dilihat dari fisik bangunan semata namun lebih dari visinya sebagai pondasi menopang pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) dari kepongkongan fundamentalisme pasar dan radikalisme agama.” (Sumber: Dokumen Pendapat Akhir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi NTT terhadap RAPBD Provinsi NTT 2018).

Selain retorika politik *deliberative*, pengekspresian ideologi partai politik ditunjukkan juga melalui retorika politik *demonstrative*. Melalui hasil observasi terhadap jalannya proses sidang di DPRD Provinsi NTT diketahui ada anggota DPRD yang menggunakan retorika ini dalam penyampaian gagasan politik. Penggunaan retorika ini bertujuan untuk mengintimidasi lawan bicara. Hal ini terlihat dalam rapat atau sidang antara pihak eksekutif dengan legislatif. Dalam penggunaan retorika ini, ekspresi ideologi partai politik tetap menjadi pijakan dalam berargumentasi. Pengekspresian ideologi partai politik tampak dalam bahasa verbal yang digunakan. Penekanannya pada pilihan kata-kata yang menegaskan pentingnya kebijakan tersebut disepakati karena sesuai dengan ideologi partai politik.

Pembahasan

Secara teoretis, analisis hasil penelitian dikelompokkan ke dalam dua kategori, seperti yang diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

Ekspresi Verbal dan Nonverbal Ideologi Partai Politik: Pengelolaan Kesan dalam Komunikasi Politik Partai Politik yang Komunikatif

Sifat ideologi yang ideal normatif dapat membentuk budaya komunikasi politik partai politik yang diekspresikan secara verbal dan

nonverbal. Hasil penelitian mengungkapkan bagaimana budaya komunikasi politik yang dijalani oleh anggota DPRD Provinsi NTT berlangsung normatif, sehingga belum berpengaruh secara signifikan terhadap budaya komunikasi politik partai politik dalam mengekspresikan ideologi partai politik. Pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal dalam berbagai sidang masih sebatas pada *clearing house of ideas* yang hidup dan dinamis (Arifin, 2011; Cangara, 2010; Littlejohn & Foss, 2009).

Ekspresi verbal dan nonverbal memberikan kekuatan atau penekanan pada isi pesan yang disampaikan, seperti; penegasan identitas diri dan pandangan politik. Kekuatan pengekspresian verbal dan nonverbal ideologi partai politik menentukan dinamika komunikasi politik. Sebagai bagian dari proses komunikasi politik, ekspresi ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal yang diungkapkan bertujuan untuk memengaruhi kebijakan politik pemerintah dan kebijakan publik (Arifin, 2011). Pencapaian tujuan komunikasi politik mencirikan komunikasi politik yang komunikatif.

Ekspresi verbal dan nonverbal ideologi partai politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan kesan di atas panggung politik. Keseluruhan ekspresi verbal dan nonverbal merupakan konstruk yang mewakili presentasi diri dan pemeliharaan identitas sosial selama berlangsungnya proses komunikasi politik. Dalam presentasi diri diperlukan strategi presentasi diri yang menggambarkan konseptualisasi pengelolaan kesan melalui taktik berkomunikasi yang tepat. Artinya, pengekspresian ideologi politik secara verbal dan nonverbal dalam proses komunikasi politik dapat memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan komunikasi politik secara bersama-sama (Littlejohn & Foss, 2009).

Pengelolaan kesan dalam proses komunikasi politik tercermin dari ekspresi verbal dan nonverbal yang ditunjukkan kepada audiens. Strategi pengelolaan kesan dalam komunikasi politik yang diterapkan oleh anggota DPRD Provinsi NTT menampilkan emosi positif saat

mengutarakan gagasan. Emosi positif terlihat dari ekspresi nonverbal dan verbal yang konsisten, seperti: senyum dan memberikan pujian kepada pemerintah atau sesama anggota DPRD. Selain itu, pengekspresian verbal dan nonverbal ideologi partai politik diwujudkan secara tepat dengan tujuan menunjukkan kualitas diri yang kompeten. Komunikasi politik yang berlangsung menjadi ajang mempromosikan diri sendiri di antara sesama anggota DPRD dan pihak pemerintah.

Kemampuan, kompetensi dan integritas diri menjadi variabel kunci dalam pengelolaan kesan audiens. Ekspresi verbal dan nonverbal ideologi partai politik dalam berbagai bentuk komunikasi politik, menghasilkan beragam pesan dibentuk dan disiasati dengan strategi *facework*. Strategi *facework* yang dipersiapkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kerugian dari wajah kita sendiri atau wajah orang lain disebut *avoidant* atau pencegahan *facework* (Littlejohn & Foss, 2009). Analisis ini menegaskan pula hasil riset sebelumnya yang mengungkapkan bagaimana semua politisi tampil memikat di panggung depan dan belakang, baik dalam gaya berbusana dan pengemasan gaya bicara.

Pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal dalam bentuk strategi *facework* terlihat dalam dinamika politik selama pelaksanaan sidang-sidang di DPRD Provinsi NTT. Misalnya, adanya perbedaan yang tajam terkait suatu agenda politik dan menimbulkan pertentangan dapat diselesaikan dengan *korektif facework*. Atau dalam menyampaikan pandangan politik, *performa* komunikasi politik yang disoroti oleh audiens menyebabkan anggota DPRD merasa malu dan kehilangan muka. Karena itu, strategi korektif *facework* dapat ditunjukkan dengan permohonan maaf dan menampilkan komunikasi politik yang apik.

Ekspresi ideologi politik secara verbal dan nonverbal diekspresikan juga secara santun di saat adanya ketegangan komunikasi oleh karena friksi yang tajam antara sesama anggota DPRD atau antara anggota DPRD dengan pihak pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya friksi yang tajam diselesaikan dengan mekanisme

demokrasi, dan melalui komunikasi politik yang santun antara pimpinan DPRD. Sebagai bagian dari proses pengelolaan kesan, komunikasi politik yang santun memiliki wajah positif, artinya adanya keinginan untuk dihargai dan disukai (Littlejohn & Foss, 2009). Kesantunan mengekspresikan ideologi partai politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT berbeda dengan hasil penelitian Irwan Pane (2011) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan *public speaking* DPRD Kota Makassar memiliki proporsi terbalik, tingkat keterampilannya dalam berkomunikasi (*public speaking*) dalam rapat-rapat cenderung emosional dan sering kali dengan suara yang tinggi.

Dalam pengelolaan kesan, ekspresi ideologi politik secara verbal dan nonverbal yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Provinsi NTT memperlihatkan suatu manajemen kesan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penekanan manajemen kesan dalam proses komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT kadangkala belum tampak dinyatakan, sehingga menantang lawan bicara untuk menampilkan kinerja komunikasi yang lebih baik atau kompetensi manajemen (Littlejohn & Foss, 2009).

Kompetensi manajemen kesan ditunjukkan pada setiap konteks komunikasi dan dalam situasi komunikasi apapun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses komunikasi politik, kompetensi komunikasi politik diperlihatkan dalam berbagai cara, salah satunya melalui kompetensi sosial. Hal ini dicirikan dengan interaksi yang fleksibel yang menegaskan bahwa identitas sosial terbentuk apa adanya (Sagarzazu & Klüver, 2017).

Pengelolaan kesan dalam pengekspresian ideologi politik secara verbal dan nonverbal yang ditunjukkan dengan rasa hormat, hubungan yang kompeten dan menampilkan wajah yang positif memunculkan proses komunikasi politik yang komunikatif. Menurut teori pengelolaan kesan, dalam situasi komunikasi politik apapun, pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal memerlukan upaya sadar untuk membangun sebuah identitas (Littlejohn & Foss, 2009). Oleh

sebab itu, diperlukan suatu motivasi yang lebih karena terdapat berbagai tantangan dalam mengonstruksi kesan saat berinteraksi di setiap panggung politik. Keterampilan menafsirkan situasi dan kemudian memberlakukan manajemen kesan yang tepat dan akurat merupakan strategi yang diasumsikan akan membuat kesan yang paling cocok (Sagarzazu & Klüver, 2017). Maka, pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal tidak hanya disiasati dengan pengelolaan kesan tetapi juga kemampuan untuk memantau kesan yang tercipta, memiliki sumber daya kognitif yang cukup, juga menunjukkan kompetensi dasar sosial.

Pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal diarahkan juga pada adanya ikhtiar untuk melindungi integritas kesan. Hal ini dijalankan dengan berbagai tindakan komunikasi politik yang memperhatikan, menghindari, atau meminimalkan potensi ancaman terhadap identitas. Oleh karena itu, proses komunikasi politik dengan menggunakan strategi *facework* dan strategi kesantunan merupakan bagian dari upaya preventif dan menciptakan iklim komunikasi politik yang kondusif.

Dalam proses komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT, ekspresi ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal diarahkan juga pada pemulihan terhadap integritas kesan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengekspresian ideologi politik secara verbal dan nonverbal menegaskan identitas sosial dan politik yang kadangkala diabaikan dan dilupakan dalam proses komunikasi politik. Menurut teori pengelolaan kesan, strategi restorasi diarahkan atau difokuskan pada pemulihan identitas diri, sosial dan politik, sehingga dapat menyangkal niat atau motivasi negatif dalam diri anggota DPRD, seperti: mengutamakan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan partai politik yang ditegaskan dalam ideologi masing-masing partai politik. Selain itu, konsistensi dan komitmen dalam pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal dijaga melalui intensitas aksi-aksi politik yang menginternalisasikan nilai-nilai politik yang baik ke dalam diri anggota DPRD.

Ekspresi ideologi partai politik yang dikemukakan dalam setiap konteks komunikasi politik diarahkan pada manajemen kesan strategis (Arriane, 2009; Harahap, 2012; Littlejohn & Foss, 2009).

Ekspresi Ideologi Partai Politik: Telaah Strategi dan Drama Komunikasi Politik Dalam Berbagai Bentuk Komunikasi Politik

Pengekspresian ideologi politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT berdasarkan visi dan misi partai politik, dalam mengatur lebih lanjut strategi dan aktivitas komunikasi politik. Setiap pesan politik yang disampaikan kepada audiens didesain secara baik dalam suatu rangkaian perencanaan komunikasi politik. Penggunaannya memerhatikan dan mempertimbangkan kemampuan internal serta situasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap agenda politik yang dibahas dalam setiap persidangan telah melalui pembicaraan di internal partai politik di tingkat fraksi dan komisi. Artinya, proses komunikasi politik yang dijalankan oleh anggota DPRD Provinsi NTT pada konteks komunikasi yang lebih luas didahului dengan pemahaman terhadap ideologi partai politik di internal partai.

Dalam konteks yang lebih luas, proses komunikasi politik yang dijalankan tetap mengedepankan ideologi partai politik pada saat menghadapi pihak eksekutif dan legislatif yang berbeda partai politik. Pada saat menyampaikan gagasan atau pandangan politik, penyusunan pola aktivitas komunikasi disesuaikan pilihan strategi, sehingga menjadi jelas dan dapat dijalankan oleh semua pelaku komunikasi (Thompson dalam Rachmitie, *et.al.*, 2009). Penyusunan strategi mengacu pada kinerja strategi komunikatif dan taktik selama proses komunikasi politik. Penerapannya mencakup pesan tertentu dalam menggerakkan sesuatu. Oleh karena itu, pengekspresian ideologi partai politik difokuskan pada artikulasi ucapan-ucapan yang menjadi ciri distributif, strategi dan taktik integratif. Selanjutnya, dalam menyampaikannya, diperhatikan bagaimana cara menghubungkan strategi dan mengelola taktik. Pengekspresian ideologi partai politik mengoptimalkan juga unsur-unsur pilihan

strategi kontekstual dan memerhatikan masalah kinerja (Littlejohn & Foss, 2009).

Salah satu dimensi penting dalam pengekspresian ideologi partai politik adalah bagaimana strategi mengelola hubungan antara sesama anggota legislatif dengan pihak eksekutif. Pengelolaan hubungan mengacu pada cara yang ditentukan dalam hubungan formal dan informal dengan siapa saja. Strategi pengelolaan hubungan dapat dijaga dalam setiap bentuk komunikasi politik melalui informasi yang dibagi dan persuasi politik. Hal ini dapat memperoleh dukungan dan menghasilkan kesepakatan serta memberikan pengaruh pada *stakeholder* kunci lainnya (Littlejohn & Foss, 2009).

Pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal oleh anggota DPRD Provinsi NTT berlangsung juga dalam tiga bentuk komunikasi politik. Meskipun agenda politik yang dikomunikasikan berbeda-beda dengan pengaturan politik yang berbeda pula, pengekspresian ideologi partai politik kadangkala tetap ditunjukkan secara lugas. Penyampaian pesan politik seperti ini ditampilkan dalam bentuk retorika politik yang terlihat dari penggunaan bahasa lisan yang indah (irama, mimik, dan intonasi suara).

Penggunaan retorika politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT bertujuan untuk menggugah emosi dan memengaruhi khalayak. Dengan menampilkan seni berbicara, penyampaian pesan memiliki daya persuasi politik yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retorika politik yang ditampilkan dalam komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT didominasi oleh retorika *deliberative*. Ekspresi ideologi partai politik yang diungkapkan melalui retorika *deliberative* terlihat dari penggunaan bahasa verbal dan intonasi suara yang menggariskan tentang pentingnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Melalui retorika *deliberative*, pengekspresian ideologi partai politik dirancang untuk memengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah. Fokus pembicaraan terletak pada keuntungan dan kerugian jika sebuah kebijakan diputuskan (Littlejohn & Foss, 2009; Sagarzazu & Klüver, 2017).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak semua agenda politik dikomunikasikan secara lugas dan transparan di antara sesama anggota DPRD Provinsi NTT dan pihak eksekutif, tetapi ada agenda politik tertentu yang dibicarakan hanya di tingkat pimpinan atau anggota DPRD provinsi secara terbatas. Pembicaraan seperti ini terjadi dalam bentuk lobi politik dan negosiasi politik. Pengekspresian ideologi partai politik yang dilaksanakan pada saat lobi politik berlangsung dalam situasi informal. Di sini terjadi berbagai pembicaraan politik yang memperkuat atau mendukung pembicaraan formal pada saat persidangan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lobi politik yang terjadi baik antara anggota DPRD Provinsi NTT dengan sesama anggota DPRD maupun anggota DPRD Provinsi NTT dengan pihak eksekutif seringkali mengabaikan ideologi politik. Hal ini disebabkan karena agenda politik yang dibicarakan pada saat lobi politik merupakan forum pembicaraan politik yang dalam perspektif atau paradigma interaksional dalam komunikasi politik diterapkan dalam bentuk komunikasi antarpersona atau tatap muka yang bersifat dialogis.

Pengekspresian ideologi partai politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT dalam lobi politik bertujuan untuk mencari dukungan atau ingin menyelesaikan perbedaan politik. Dalam lobi politik, pengaruh pribadi sangat penting yang berkaitan dengan kompetensi, penguasaan masalah, jabatan dan kepribadian. Fenomena inilah yang menyebabkan inkonsistensi anggota DPRD Provinsi NTT dalam mengekspresikan ideologi partai politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa inkonsistensi ekspresi ideologi partai politik berbeda pada setiap panggung politik. Ada beberapa alasan yang menyebabkan realitas tersebut, di antaranya ciri-ciri percakapan lobi politik, derajat pentingnya isi pesan dan efek serta umpan balik yang ditimbulkan.

Percakapan politik yang terjadi dalam lobi politik cenderung berciri koorientasi. Anggota DPRD Provinsi NTT yang melakukan pembicaraan politik kadangkala memiliki orientasi yang berbeda. Perbedaan orientasi politik menyebabkan terjadinya

inkonsistensi pengekspresian ideologi partai politik. Pada saat lobi politik, pengekspresian ideologi partai politik antara para pembicara yang saling mengenal diungkapkan melalui permainan wajah, permainan suara dan permainan sikap. Dalam percakapan politik itu terdapat transaksi yang di dalamnya para politisi memiliki motif yang implisit dan eksplisit, serta memperoleh kerugian dan keuntungan dalam proses tersebut (Nimmo, 2004; Sagarzazu & Klüver, 2017).

Selain lobi politik, pengekspresian ideologi partai politik terjadi juga dalam negosiasi politik. Di dalam negosiasi politik, terjadi interaksi politik antara pihak-pihak yang terlibat yang berbeda pandangan dengan maksud untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Pendekatan komunikatif dengan studi negosiasi telah difokuskan pada interaksi elemen-elemen dalam proses negosiasi dengan menggunakan cara simbol, pesan, dan bahasa untuk membujuk orang lain dalam proses mencapai kesepakatan (Arifin, 2011; Littlejohn & Foss, 2009).

Negosiasi politik bertujuan untuk meminimalisasi konflik-konflik yang muncul pada saat proses komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam negosiasi politik, anggota DPRD Provinsi NTT mengekspresikan ideologi partai politik secara verbal dalam setiap pembicaraan politik. Negosiasi politik terjadi apabila ada friksi yang tajam dan potensial menimbulkan konflik kepentingan. Untuk menjaga situasi politik yang stabil, pengekspresian ideologi partai politik ditunjukkan secara konsisten dan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk mengelola konflik dalam hubungan antarpribadi, kelompok, dan organisasi. Dalam negosiasi politik, pengekspresian ideologi partai politik menjadi landasan filosofis saat menyampaikan usulan atau argumen politik sehingga mudah menghasilkan kesepakatan.

Akan tetapi, hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa dalam negosiasi politik kadangkala pengekspresian ideologi partai politik kurang ditampilkan dalam setiap pembicaraan politik. Situasi inilah yang menyebabkan semakin tajamnya perbedaan antara anggota DPRD Provinsi NTT.

Munculnya fenomena ini disebabkan karena motivasi politik yang kabur dan belum terinternalisasinya ideologi politik dalam diri anggota DPRD Provinsi NTT.

Selain itu, dari perspektif komunikasi dijelaskan bahwa tiga variabel dalam negosiasi memiliki kaitan dengan bagaimana pengekspresian ideologi partai politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT pada saat melakukan komunikasi politik. Komitmen anggota DPRD dalam mengekspresikan ideologi partai politik ditentukan dari *framing* politik. *Framing* menekankan pada bagaimana cara menjelajahi visi, perspektif, atau sikap individu yang menggunakan atau menciptakan pengaruh dengan cara membuat situasi dan posisi tawar. Pengekspresian ideologi partai politik dalam negosiasi politik memperhatikan bahasa yang digunakan orang, cara membuat proposal dan usul balasan, serta mengantisipasi masalah yang menciptakan akibat yang muncul secara berkelanjutan dalam bingkai yang digunakan (Arifin, 2011; Nimmo, 2004; Littlejohn & Foss, 2009).

Pengekspresian ideologi partai politik oleh anggota DPRD Provinsi NTT memerhatikan juga pilihan keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari pembicaraan politik dengan melihat berbagai pesan yang diterima secara perseorangan, dan langkah yang diambil. Dalam penyampaian sikap atau pandangan politik, ada kecenderungan untuk menganalisis alasan dan motif dibalik usulan pembicaraan politik tersebut. Oleh karena itu, pengekspresian ideologi partai politik menekankan pentingnya pendekatan psikologis untuk *framing*, dalam hal ini mekanisme kognitif yang berfungsi sebagai filter. Melalui mekanisme kognitif yang diprogramkan secara baik maka terbentuklah persepsi dalam diri yang memengaruhi cara negosiasi politik. Dengan demikian, pendekatan komunikasi yang berorientasi *framing* merupakan suatu proses interaktif yang berkelanjutan (Nimmo, 2004; Sagarzazu & Klüver, 2017).

PENUTUP

Simpulan

Pengekspresian ideologi partai politik secara verbal dan nonverbal oleh anggota DPRD Provinsi NTT seringkali menunjukkan inkonsistensi antara ideologi partai politik yang dianut dengan agenda politik yang disampaikan.

Pengekspresian ideologi partai politik mengarah pada pengelolaan kesan audiens yang menampilkan emosi positif, kesantunan, manajemen kesan dan strategi *facework* untuk mencapai tujuan komunikasi yang diungkapkan dalam berbagai pilihan strategi dan taktik.

Pengekspresian ideologi partai politik oleh anggota DPRD dilakukan dalam berbagai bentuk komunikasi politik, seperti: lobi politik, negosiasi politik, dan retorika politik yang menghadirkan tiga panggung politik sebagai ruang berkomunikasi. Ketiga bentuk komunikasi politik tersebut memiliki perbedaan agenda politik dan seringkali mengalami distorsi pesan dan inkonsistensi pesan yang berimplikasi terhadap kualitas kinerja komunikasi anggota DPRD.

Saran

Dalam pengekspresian ideologi partai politik pada saat komunikasi politik anggota DPRD Provinsi NTT sebaiknya diperhatikan konsistensi pengekspresian secara verbal dan nonverbal. Kedua, dalam pengekspresian ideologi partai politik, penggunaan strategi komunikasi politik sebaiknya memperhatikan agenda politik, latar politik, audiens dan bentuk-bentuk komunikasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2009) Fungsi Komunikasi Politik Partai Dalam Pemilu (Sebuah Tinjauan terhadap Kesuksesan dan Kegagalan Partai Politik dalam Pemilu). *Jurnal Observasi*, (Vol 7), 2.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arrianie, L. (2009). Sandiwara di Senayan: Studi Dramaturgis Komunikasi Politik di DPR RI. Dedy Mulyana dan Solatun (eds). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, B. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana.

- Cangara, H. (2010). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta. Rajawali Press.
- Dutu, O. (2011). The role of the political language in explaining the world. *Economics, Management, and Financial Markets*, 6(1), 1091–1095.
- Gurău, C., & Ayadi, N. (2011). Political Communication Management: The Strategy of the Two Main Candidates During the 2007 French Presidential Elections. *Journal of Communication Management*, 15 (1), 5–22.
<http://doi.org/10.1108/13632541111105222>
- Hasang, Fellicia Eveline dan Shidarta, G. Genep Sukendro. (2012). Ideologi dalam konteks komunikasi politik (Kajian Semiotik terhadap Iklan Nasional Demokrat versi “Himne”), *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara*, 3 (2), 42–49.
- Husain, M. N. (2011). Penerapan Komunikasi Politik dalam Penetapan Peraturan Daerah Kota Kendari, 1, 211–222.
- Kumaini, A., & Anwar, K. (2012). Komunikasi Politik Pemerintah Daerah Dan Dprd Dalam Penyusunan APBD. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. Pekanbaru: Universitas Riau, 125–130.
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2009a). *Encyclopedia of Communication Theory*. London. Sage Publications.
<http://doi.org/10.4135/9781412959384>.
- Maarotong, J. (2014). Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik. *Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- McNair, B. (n.d.). *An Introduction to Political Communication, Third Edition*. London dan New York. Routledge.
- Moeleong, Lexy J. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Monroe, S. L. (2012). Salafis in Parliament: Democratic Attitudes and Party Politics in the Gulf. *The Middle East Journal*, 66 (3), 409–424. <http://doi.org/10.3751/66.3.11>
- Nimmo, Dan. (2004). *Komunikasi Politik*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Pane, Irwani. (2011) Analisis Kemampuan *Public Speaking* Anggota DPRD Kota Makassar Masa Bakti 2009-2014. *Jurnal Komunikasi Kareba*, (1), 1 dalam (journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/369/226).
- Pulungan, H. K. (2000). Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara, 3.
- Rachmiate, A., Hasbiansyah, O., Khotimah, E., & Ahmadi, D. (2013). Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2), 123–132. <http://doi.org/10.1007/s00277-016-2741-8>.
- Sagarzazu, I., & Klüver, H. (2017). Coalition Governments and Party Competition: Political Communication Strategies of Coalition Parties. *Political Science Research and Methods*, 5(2), 333–349. <http://doi.org/10.1017/psrm.2015.56>.
- Sulaiman, Adhi Iman. (2013) Komunikasi Politik dalam Demokratisasi. *Jurnal Observasi*, 11 (2).
- Syahruni, Hafied Cangara, S. B. (2012). Conflict in Political Communication Between the Legislative and Executive in Response to Spatial Plan. *Jurnal Kajian Media Dan Dinamika Politik*, (139).
- Winda. (2016) Etika Komunikasi Anggota DPRD dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat (Studi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur)”. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 4 (3) dalam ([http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/ejournal_Winda%20\(08-11-16-05-06-07\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/ejournal_Winda%20(08-11-16-05-06-07).pdf)).